



Policy Analysis of the Ecotheology Program at UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: Curriculum Challenges and Synergy

Analisis Kebijakan Program Ekoteologi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: Tantangan Kurikulum dan Sinergi

Risye Martarika

State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Author Correspondence Email: risyemartarika@gmail.com

Article History	Received (August 14 th , 2025)	Revised (September 16 th , 2025)	Accepted (October 10 th , 2025)
-----------------	--	--	---

Article News

Keyword:

*Ecotheology;
Education
Policy;
Curriculum
Relevance;
Stakeholder
Synergy;
UIN Sulthan
Thaha Saifuddin
Jambi.*

Abstract

This policy article is motivated by the unsuccessful implementation of the Ministry of Religious Affairs' ecotheology priority program at UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. A gap exists between the program's ideal goal of producing relevant graduates and the reality on the ground, where curriculum implementation has not been effectively integrated with the real needs of the local community and industry, and weak synergy between stakeholders. The methodology of this paper uses a qualitative approach with a descriptive analysis approach, case study and Urgency, Seriousness, Growth (USG) analysis and William N. Dunn's theory. The results of the paper indicate that "Lack of Curriculum Relevance" is the most prioritized problem with a total score of 14. The root of the problem is the limited understanding and awareness of UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi's internal stakeholders regarding the urgency of curriculum renewal. The most effective policy alternative is "Partnership-Based Curriculum Revision" with a score of 21. The Conclusion and Recommendations of this paper recommend the issuance of a Rector's Circular to issue a Partnership-Based Ecotheology Program Curriculum Revision involving academics, practitioners, industry, and local governments to ensure graduates have competencies relevant to contemporary environmental challenges.

Kata Kunci:

*Ekoteologi;
Kebijakan
Pendidikan;
Relevansi
Kurikulum;
Sinergi
Pemangku
Kepentingan;
UIN Sulthan
Thaha Saifuddin
Jambi.*

Abstrak

Artikel kebijakan ini dilatarbelakangi dari belum berhasilnya program prioritas ekoteologi dari Kementerian Agama di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Kesenjangan terjadi antara tujuan ideal program untuk menghasilkan lulusan yang relevan dan kenyataan di lapangan, di mana implementasi kurikulum belum terintegrasi secara efektif dengan kebutuhan nyata masyarakat dan industri lokal, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Metodologi tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, studi kasus dan analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) serta teori William N. Dunn. Hasil tulisan menunjukkan bahwa "Kurangnya Relevansi Kurikulum" merupakan masalah paling prioritas dengan total skor 14. Akar masalahnya adalah keterbatasan pemahaman dan kesadaran dari pemangku kepentingan internal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengenai urgensi pembaruan kurikulum. Alternatif kebijakan yang paling efektif adalah "Revisi Kurikulum Berbasis Kemitraan" dengan skor 21.

Kesimpulan dan Saran dari tulisan ini merekomendasikan penerbitan Surat Edaran Rektor untuk menerbitkan Revisi Kurikulum Program Ekoteologi Berbasis Kemitraan yang melibatkan akademisi, praktisi, industri, dan pemerintah daerah untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan tantangan lingkungan kontemporer.

To cite this article: Risye Martarika. (2025). Policy Analysis of the Ecotheology Program at UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: Curriculum Challenges and Synergy. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), 1029-1054.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan ekoteologi sebagai salah satu program prioritas dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran lingkungan. Program ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman teologis yang mendalam, tetapi juga peka terhadap tantangan ekologis kontemporer, terutama di tingkat lokal (Kementerian Agama, 2023). Inisiatif ini selaras dengan agenda global yang menekankan peran agama dalam mendorong keberlanjutan dan mitigasi krisis iklim (Tucker & Grim, 2000). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagai salah satu institusi pendidikan Islam terkemuka di Sumatera, ditunjuk untuk menjadi pelaksana program ini, mengingat posisi strategisnya di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, namun juga rentan terhadap isu-isu lingkungan seperti deforestasi dan kerusakan gambut.

Namun, dalam perjalanannya, implementasi program ekoteologi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Meskipun kerangka kebijakan telah dirumuskan, terdapat kesenjangan yang mencolok antara tujuan program yang ambisius dengan realitas di lapangan. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya masalah struktural dan implementasi yang menghambat pencapaian target program. Permasalahan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan dan manajerial yang memerlukan analisis mendalam untuk menemukan solusi yang tepat.

Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah ketidakmampuan program ekoteologi untuk secara efektif beradaptasi dengan kebutuhan nyata masyarakat dan industri lokal. Wilayah Jambi memiliki karakteristik ekologi yang unik, dengan hutan tropis, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, wilayah ini juga dihadapkan pada tantangan besar seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan ilegal logging yang berdampak pada kerusakan lingkungan (KLHK Jambi, 2024). Kurikulum yang ada seharusnya dapat merespons isu-isu spesifik ini, namun nyatanya, materi ajar cenderung bersifat umum dan kurang kontekstual.

Kesenjangan kurikulum ini berakibat pada ketidakrelevanan lulusan dengan pasar kerja dan kebutuhan advokasi lingkungan di tingkat lokal. Lulusan ekoteologi diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat menawarkan solusi berbasis spiritual dan ilmiah untuk masalah lingkungan. Namun, karena kurangnya paparan terhadap praktik lapangan dan isu-isu spesifik Jambi, mereka kesulitan untuk mengaplikasikan pengetahuannya secara efektif. Hal ini menurunkan daya saing lulusan dan melemahkan peran UIN sebagai pusat keunggulan ekoteologi di wilayah tersebut (Wawancara dengan LPPM UIN, 2025).

Selain masalah kurikulum, program ini juga terkendala oleh lemahnya sinergi antara pemangku kepentingan. Ekoteologi pada hakikatnya adalah bidang interdisipliner yang

menuntut kolaborasi erat antara akademisi, praktisi lingkungan, pemerintah daerah, komunitas adat, dan sektor swasta (Barrow, 2017). Di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kolaborasi ini belum terjalin secara kuat dan terstruktur. Komunikasi yang minim dan kurangnya platform kolaborasi formal menyebabkan setiap pihak bergerak sendiri-sendiri tanpa visi yang terpadu.

Pihak praktisi dan pemerintah daerah, seperti KLHK Jambi, seringkali memiliki informasi dan data lapangan yang sangat relevan, namun masukan mereka tidak terintegrasi dalam perumusan kurikulum atau strategi program. Keterbatasan ini mengakibatkan program ekoteologi menjadi "menara gading" yang terisolasi dari realitas di lapangan. Tanpa dukungan dan masukan dari pihak eksternal, program ini kehilangan relevansinya dan sulit untuk mencapai dampak sosial yang signifikan (Wawancara dengan perwakilan KLHK Jambi, 2024).

Analisis mendalam dengan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) menegaskan bahwa masalah relevansi kurikulum adalah prioritas utama yang harus segera ditangani. Masalah ini dinilai memiliki tingkat urgensi dan pertumbuhan yang sangat tinggi, karena jika dibiarkan, kesenjangan antara teori dan praktik akan semakin lebar, dan program ekoteologi akan kehilangan kredibilitasnya (Laporan BMN UIN, 2025). Lemahnya sinergi pemangku kepentingan berada di urutan berikutnya, karena masalah ini secara langsung memengaruhi kemampuan program untuk mengatasi masalah kurikulum dan mencapai keberlanjutan.

Dokumen kebijakan ini juga mengidentifikasi penyebab-penyebab mendasar dari kurangnya relevansi kurikulum. Salah satunya adalah keterlambatan dalam pembaruan kurikulum. Proses birokrasi yang panjang dan kaku di lingkungan akademik, seringkali membuat kurikulum tidak diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan isu lingkungan dan teknologi. Hal ini diperparah dengan kurangnya inisiatif dari pihak internal kampus untuk melakukan revisi yang proaktif (Laporan Tinjauan Kurikulum, LPM UIN, 2024).

Selain itu, minimnya riset kebutuhan pasar juga menjadi penyebab utama. Belum ada riset yang mendalam dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi keterampilan spesifik yang dibutuhkan oleh industri dan lembaga swadaya masyarakat di Jambi. Kurikulum cenderung disusun berdasarkan asumsi teoritis tanpa validasi data lapangan yang kuat, yang menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi tantangan nyata (Wawancara dengan LPM UIN, 2025).

Faktor internal lain yang berkontribusi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Program ekoteologi menghadapi tantangan dalam menemukan dan merekrut dosen yang memiliki keahlian interdisipliner, yaitu penguasaan di bidang teologi dan ekologi secara bersamaan. Mayoritas dosen cenderung ahli pada salah satu bidang saja, sehingga integrasi kedua disiplin ilmu dalam kurikulum menjadi tidak optimal (Profil Dosen UIN, 2025).

Kurangnya program pengembangan dosen juga memperburuk kondisi ini. Tidak ada pelatihan khusus yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dosen secara interdisipliner, yang membuat mereka kesulitan untuk mengintegrasikan materi ajar secara efektif. Keterbatasan anggaran untuk mengundang pakar luar juga menghambat upaya untuk memperkaya materi ajar dan memberikan perspektif baru kepada mahasiswa (Laporan Pengembangan SDM, 2024).

Minimnya keterlibatan praktisi dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kurikulum juga menjadi penyebab signifikan. Tidak adanya platform kolaborasi yang terstruktur dan rutin menyebabkan pertukaran informasi dari lapangan tidak berjalan lancar. Akibatnya, kurikulum lebih bersifat teoritis dan tidak mencerminkan tantangan serta praktik nyata di lapangan (Wawancara dengan LPPM, 2025).

Pada level yang lebih dalam, akar dari semua permasalahan ini adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan internal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akan urgensi pembaruan kurikulum. Keterbatasan pemahaman ini menciptakan inersia yang menghambat perubahan dan adaptasi. Tanpa adanya dorongan kuat dari internal, proses birokrasi menjadi lambat dan inisiatif untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal menjadi lemah (*Outlook Kemenag*, 2024).

Fenomena ini dapat dilihat sebagai kegagalan dalam manajemen perubahan kebijakan di tingkat institusi. Meskipun ada kebijakan dari Kementerian Agama untuk mendorong ekoteologi, kebijakan tersebut tidak diiringi dengan kesiapan internal yang memadai. Kurangnya kepemimpinan yang visioner dalam menyadari pentingnya kurikulum yang dinamis menjadi hambatan terbesar. Akibatnya, program ekoteologi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam merespons isu lingkungan, justru tertinggal.

Problem statement yang dirumuskan dari analisis ini adalah: kebijakan program prioritas ekoteologi Kementerian Agama pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak efektif karena adanya keterbatasan pemahaman dari pemangku kepentingan internal terkait urgensi pembaruan kurikulum. Keterbatasan ini berdampak pada keterlambatan adaptasi kurikulum dengan isu-isu lingkungan kontemporer dan melemahkan sinergi dengan pihak eksternal.

Implikasi dari permasalahan ini sangat luas. Pertama, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berpotensi kehilangan peran strategisnya sebagai pusat keunggulan ekoteologi di Sumatera. Jika kurikulum dan lulusan tidak relevan, kredibilitas institusi akan menurun di mata masyarakat dan calon mahasiswa. Kedua, upaya mitigasi masalah lingkungan di Jambi menjadi terhambat karena tidak adanya kontribusi signifikan dari akademisi dan lulusan yang kompeten.

Ketiga, investasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk program ini menjadi kurang optimal. Jika program tidak memberikan dampak yang signifikan, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap efektivitas kebijakan ekoteologi secara keseluruhan. Ini juga menunjukkan adanya kegagalan dalam alur kebijakan, dari perumusan di tingkat pusat hingga implementasi di tingkat daerah.

Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan yang komprehensif untuk mengidentifikasi titik-titik kritis dalam implementasi program ini. Analisis ini tidak hanya akan mengulas permasalahan yang ada, tetapi juga merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mengatasi akar masalah. Fokus utama akan diberikan pada bagaimana UIN dapat merevitalisasi kurikulumnya dan membangun sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan.

Dokumen kebijakan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Kementerian Agama. Temuan dari artikel ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, efisien, dan berdampak. Dengan demikian, program ekoteologi dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya, yaitu menghasilkan intelektual muslim yang berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui analisis kebijakan ini, kami berharap dapat menyajikan peta jalan yang jelas untuk perbaikan. Peta jalan ini akan mencakup langkah-langkah konkret, mulai dari revisi kurikulum, pembentukan platform kolaborasi, hingga peningkatan kapasitas SDM. Dengan demikian, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat mewujudkan program ekoteologi yang relevan, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi kelestarian lingkungan di Jambi.

Ketidakberhasilan program ini juga dapat dilihat dari perspektif teori kebijakan publik. Program ekoteologi, yang merupakan kebijakan dari tingkat pusat (Kementerian

Agama), mengalami kegagalan pada tahap implementasi di tingkat daerah, yaitu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Menurut teori top-down implementation, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, dan dukungan dari pelaksana di tingkat bawah (Pressman & Wildavsky, 1973). Dalam konteks ini, meskipun tujuan program sudah jelas, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengalami defisit sumber daya baik anggaran, sumber daya manusia, maupun infrastruktur serta kurangnya pemahaman yang mendalam dari internal kampus, yang pada akhirnya menghambat implementasi yang efektif.

Sebagai perbandingan, beberapa institusi pendidikan Islam lain di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan ekoteologi. Contohnya, UIN Raden Fatah Palembang yang mengambil inisiatif untuk menjadikan kampusnya sebagai model kampus hijau dengan gerakan menanam pohon dan mengurangi limbah (UIN Raden Fatah Palembang, 2025). Meskipun demikian, program-program ini seringkali masih bersifat parsial dan belum terintegrasi sepenuhnya ke dalam kurikulum inti. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi ekoteologi bukan hanya dihadapi oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, melainkan merupakan isu sistemik yang dialami banyak institusi, meskipun dengan tingkat dan penyebab yang berbeda.

Masalah ini semakin mendesak mengingat kondisi lingkungan di Jambi yang memerlukan intervensi serius. Provinsi Jambi terus menghadapi ancaman deforestasi, kerusakan ekosistem gambut, dan kebakaran hutan yang berulang (WALHI Jambi, 2024). Peran UIN sebagai lembaga pendidikan yang mencetak intelektual dan pemimpin masa depan sangat vital dalam menawarkan solusi. Ekoteologi seharusnya menjadi landasan moral dan intelektual bagi lulusan untuk terlibat aktif dalam konservasi dan advokasi lingkungan, bukan hanya sebatas mata kuliah teoritis. Tanpa program yang efektif, UIN berisiko kehilangan momentum dan relevansinya dalam merespons krisis lingkungan di wilayahnya.

Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam dan holistik mengenai tantangan kebijakan yang dihadapi program ekoteologi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis akan mengupas tuntas mengapa program ini belum berhasil, dengan fokus pada keterkaitan antara kurikulum yang tidak relevan, lemahnya sinergi, dan akar masalah kebijakan yang ada. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar pijakan untuk perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Secara spesifik, dokumen kebijakan ini akan mengidentifikasi langkah-langkah praktis untuk merevitalisasi program, seperti mendorong revisi kurikulum yang lebih responsif terhadap isu lokal, membangun platform kolaborasi yang formal dan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan eksternal, serta meningkatkan kesadaran internal kampus akan pentingnya ekoteologi. Melalui perbaikan di area-area ini, program ekoteologi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diharapkan dapat bertransformasi dari sekadar kebijakan di atas kertas menjadi sebuah gerakan nyata yang berdampak signifikan bagi lingkungan dan masyarakat.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Relevansi Kurikulum dengan Kebutuhan Lokal

Kurikulum program ekoteologi belum sepenuhnya terintegrasi dengan isu-isu lingkungan spesifik dan kebutuhan nyata masyarakat serta industri di Jambi. Hal ini menyebabkan lulusan program studi memiliki keterampilan yang kurang relevan

untuk mengatasi masalah ekologi di tingkat lokal. Analisis USG menunjukkan bahwa masalah ini memiliki urgensi yang sangat mendesak (skor 5) karena lulusan tidak siap menghadapi kebutuhan pasar kerja, dan berpotensi memburuk (skor 5) seiring perkembangan pesat isu lingkungan dan teknologi. Masalah ini menduduki peringkat pertama sebagai prioritas utama yang harus segera diselesaikan.

2. Lemahnya Sinergi Antara Pemangku Kepentingan

Belum terjalin kolaborasi yang kuat dan terstruktur antara akademisi, praktisi lingkungan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. Keterbatasan komunikasi dan kerja sama ini menghambat perumusan strategi program yang berkelanjutan dan penerapan solusi ekologi yang efektif di masyarakat. Menurut analisis USG, masalah ini dinilai sangat serius (skor 5) karena tanpa dukungan praktisi dan industri, lulusan akan kesulitan mendapatkan pengalaman praktis dan jaringan kerja. Masalah ini menjadi prioritas kedua (total skor 13) dan penanganannya dapat dilakukan setelah perbaikan kurikulum.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Program ekoteologi mengalami kendala dalam hal jumlah dan kualifikasi dosen yang memiliki keahlian gabungan di bidang ekologi dan teologi secara bersamaan. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung, seperti laboratorium yang memadai, masih terbatas. Meskipun kurang mendesak dibandingkan dua masalah di atas, masalah ini dinilai cukup serius (skor 4) karena memengaruhi kualitas pengajaran dan penelitian. Jika tidak ditangani, kualitas pembelajaran dapat menurun. Masalah ini dapat ditangani setelah dua masalah utama yang lebih prioritas teratasi.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dilakukan analisis prioritas menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Penilaiannya adalah sebagai berikut:

- *Urgency*: Seberapa mendesak masalah harus ditangani.
- *Seriousness*: Seberapa serius dampak yang ditimbulkan oleh masalah.
- *Growth*: Seberapa besar kemungkinan masalah akan memburuk jika dibiarkan.

Setiap masalah dinilai menggunakan skala 1 (sangat rendah) hingga 5 (sangat tinggi) untuk menemukan prioritas utama. Adapun hasil dari analisis USG sebagai berikut:

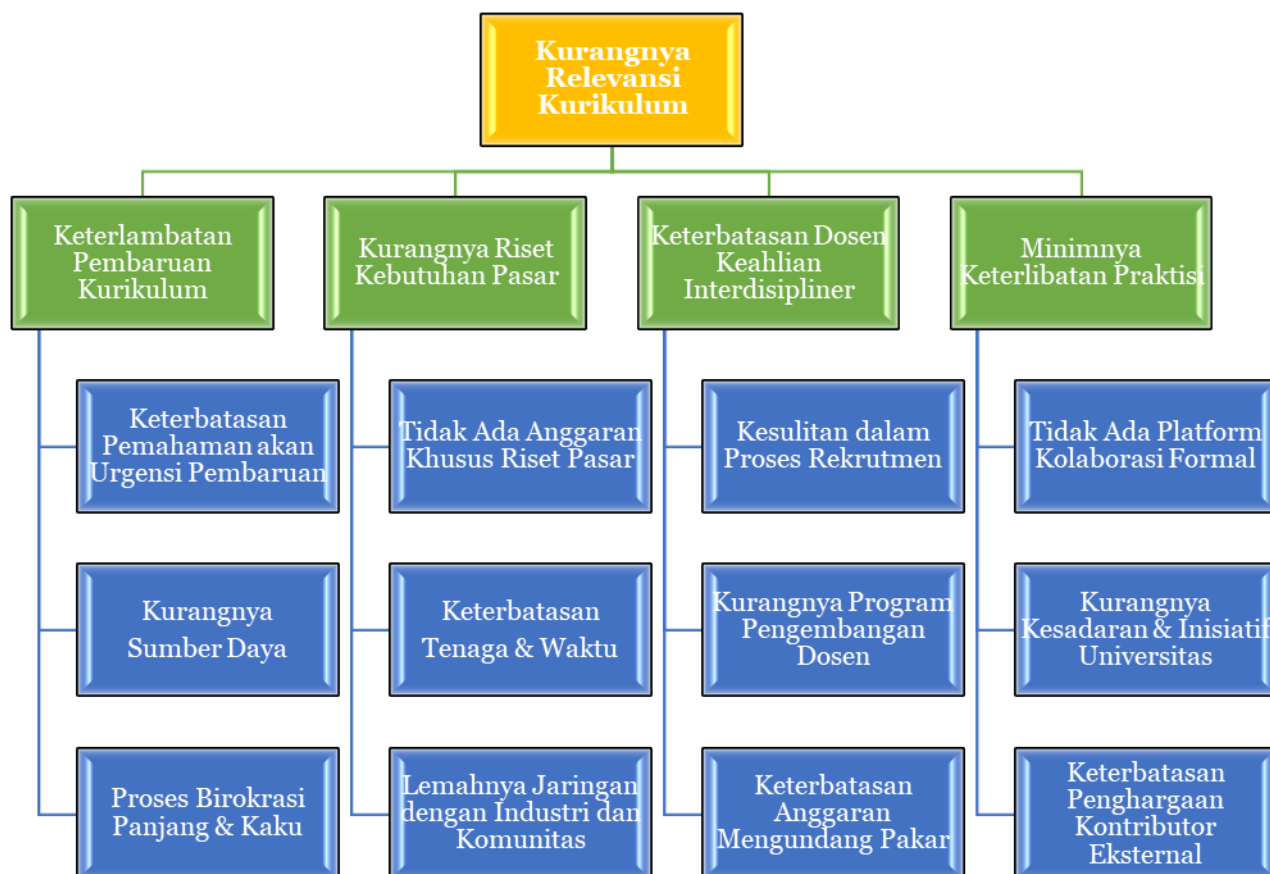
Tabel 1. Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)

No	Identifikasi Masalah	U	S	G	Total Skor
1	<p>Kurangnya Relevansi Kurikulum:</p> <p><i>Urgensi</i>: Sangat mendesak karena lulusan tidak siap menghadapi kebutuhan pasar kerja dan isu lingkungan lokal yang dinamis.</p> <p><i>Serius</i>: Cukup serius karena berpotensi menurunkan kualitas dan reputasi pengajaran pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jika dibiarkan, konsep ekoteologi bisa kehilangan relevansi di mata calon mahasiswa dan pemangku kepentingan.</p> <p><i>Growth</i>: Sangat berpotensi memburuk seiring perkembangan pesat isu lingkungan dan teknologi. Jika tidak diperbarui, kesenjangan antara teori dan praktik akan semakin lebar.</p>	5	4	5	14
2	<p>Lemahnya Sinergi Pemangku Kepentingan:</p> <p><i>Urgensi</i>: Mendesak karena kolaborasi adalah kunci keberlanjutan program dan relevansi di masyarakat. Tanpa sinergi, program akan berjalan sendiri-sendiri tanpa dampak yang signifikan.</p>	4	5	4	13

No	Identifikasi Masalah	U	S	G	Total Skor
	<p><i>Serius</i>: Sangat serius karena tanpa dukungan dari praktisi dan industri, lulusan akan kesulitan mendapatkan pengalaman praktis dan jaringan kerja.</p> <p><i>Growth</i>: Cukup berpotensi memburuk karena pihak luar akan semakin enggan berkolaborasi jika program tidak menunjukkan hasil yang konkret, menciptakan lingkaran setan.</p>				
3	<p>Keterbatasan SDM dan Infrastruktur:</p> <p><i>Urgensi</i>: Kurang mendesak dibandingkan dua masalah di atas, karena perbaikan infrastruktur dan rekrutmen SDM membutuhkan waktu dan anggaran yang besar.</p> <p><i>Serius</i>: Cukup serius karena memengaruhi kualitas pengajaran dan penelitian. Tanpa dosen yang memadai, kualitas pembelajaran bisa menurun.</p> <p><i>Growth</i>: Cukup berpotensi memburuk jika tidak ada alokasi anggaran khusus. Namun, dampaknya tidak secepat masalah relevansi kurikulum.</p>	3	4	3	10

Berdasarkan analisis USG, Kurangnya Relevansi Kurikulum menjadi masalah paling prioritas yang harus segera diselesaikan (Total Skor 14). Perbaikan kurikulum akan menjadi fondasi bagi keberlanjutan program dan memberikan dampak yang lebih relevan. Setelah itu, fokus harus beralih ke “Lemahnya Sinergi Antara Pemangku Kepentingan” (Total Skor 13), yang akan mendukung implementasi kurikulum baru dan memperkuat posisi program di masyarakat. Masalah “Keterbatasan SDM dan Infrastruktur” dapat ditangani setelah dua masalah utama tersebut teratasi.

Berdasarkan identifikasi masalah, kemudian penulis membuat akar masalahnya dalam bentuk pohon masalah berikut ini:



Gambar 1. Pohon Masalah

Berdasarkan pohon masalah diatas, terlihat bahwa akar masalahnya adalah:

1. Kurangnya Relevansi Kurikulum
2. Keterlambatan dalam Pembaruan Kurikulum
3. Keterbatasan Pemahaman akan Urgensi Pembaruan

Akar masalah kebijakan dari analisis ini adalah keterbatasan pemahaman dan kesadaran akan urgensi pembaruan kurikulum di kalangan pemangku kepentingan internal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Keterbatasan pemahaman ini menjadi penyebab utama dari lambatnya proses pembaruan kurikulum program ekoteologi. Meskipun kurikulum sudah kurang relevan dengan kebutuhan pasar dan isu lingkungan kontemporer, tidak adanya dorongan kuat dari internal kampus untuk melakukan revisi secara berkala mengakibatkan program studi pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak berkembang dan terancam kehilangan relevansi. Keterlambatan ini bukan hanya disebabkan oleh proses birokrasi, tetapi juga oleh minimnya inisiatif yang muncul dari internal karena tidak semua pihak menyadari betapa pentingnya kurikulum yang dinamis dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan program.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka *problem statement* kebijakan yang dapat dirumuskan adalah: kebijakan program prioritas ekoteologi Kementerian Agama pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak efektif karena adanya keterbatasan pemahaman dari pemangku kepentingan internal terkait urgensi pembaruan kurikulum,

yang berdampak pada keterlambatan adaptasi kurikulum dengan isu-isu lingkungan kontemporer. Akibatnya, lulusan pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini menjadi kurang relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan industri lokal, sehingga tujuan optimalisasi program ekoteologi oleh Kementerian Agama tidak tercapai secara maksimal.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab tidak efektifnya kebijakan program ekoteologi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Secara spesifik, tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi akar masalah dari kurangnya relevansi kurikulum dan lemahnya sinergi pemangku kepentingan, mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan yang mungkin diterapkan menggunakan kerangka analisis yang sistematis, serta merumuskan satu rekomendasi kebijakan yang paling strategis dan aplikatif. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas untuk mengoptimalkan implementasi program agar sejalan dengan tujuan awalnya, yaitu menghasilkan lulusan yang relevan dan mampu mengatasi masalah lingkungan secara efektif.

Manfaat Kajian

Manfaat dari artikel ini terbagi atas manfaat praktis dan teoretis. Secara praktis, hasil artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasis bukti kepada pimpinan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Kementerian Agama untuk meningkatkan relevansi kurikulum dan dampak program ekoteologi. Selain itu, artikel ini dapat menjadi model acuan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam implementasi program studi yang bersifat interdisipliner. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada khazanah literatur ilmiah mengenai analisis kebijakan pendidikan tinggi, manajemen kurikulum berbasis kompetensi, serta penerapan konsep ekoteologi dalam konteks menjawab tantangan lingkungan kontemporer di Indonesia.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Kebijakan (*William N. Dunn*)
Teori ini menekankan bahwa efektivitas kebijakan diukur dari sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Dalam konteks ini, tujuan optimalisasi program ekoteologi Kemenag adalah menghasilkan lulusan yang relevan dan mampu mengatasi masalah lingkungan. Jika kurikulum tidak diperbarui dan tidak relevan, maka tujuan ini tidak tercapai, yang menunjukkan rendahnya efektivitas kebijakan. (Sumber: *Dunn, W. N. (2012). Public Policy Analysis: An Integrated Approach*).
2. Teori Implementasi Kebijakan *Top-Down* dan *Bottom-Up*
Pendekatan ini menganalisis bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan. Dalam kasus ini, kebijakan dari Kementerian Agama (tingkat *top-down*) tidak diimplementasikan secara efektif di tingkat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi karena adanya resistensi atau kurangnya pemahaman di tingkat pelaksana (*bottom-up*). Kesenjangan antara kebijakan pusat dan praktik di lapangan menjadi penghambat utama. (Sumber: *Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy*).

3. Teori Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

KBK menekankan bahwa kurikulum harus berfokus pada penguasaan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Masalah kurikulum yang tidak relevan pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip KBK. Kurikulum yang ada tidak berhasil membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis untuk memecahkan masalah ekologi, sehingga kompetensi lulusan tidak sesuai dengan tuntutan pasar. (Sumber: *Mulyasa, E.* (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasinya*).

4. Teori Relevansi Pendidikan Tinggi

Teori ini menyatakan bahwa pendidikan tinggi harus memiliki korelasi signifikan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Rendahnya relevansi kurikulum ekoteologi pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menunjukkan adanya kesenjangan antara "penawaran" lulusan dari universitas dengan "permintaan" kompetensi dari dunia kerja dan masyarakat. Kondisi ini bisa menyebabkan lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang relevan dan berkontribusi secara nyata. (Sumber: *Muhson, A., dkk.* (2012). "Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi dengan Dunia Kerja").

5. Teori Inovasi Kebijakan Publik

Teori ini menjelaskan bahwa adaptasi kebijakan publik, termasuk di sektor pendidikan, harus terus menerus dilakukan untuk menjawab perubahan lingkungan. Keterlambatan dalam pembaruan kurikulum menunjukkan bahwa institusi belum berinovasi secara memadai. Kegagalan ini disebabkan oleh resistensi terhadap perubahan, kurangnya insentif, dan minimnya komunikasi antar-pihak yang terlibat dalam perumusan kurikulum. (Sumber: *Rogers, E. M.* (2003). *Diffusion of Innovations, 5th ed*).

Kerangka Konseptual

1. Konsep *Ecological Citizenship*

Konsep ini menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan praktis terhadap lingkungan. Pendidikan ekoteologi yang ideal harus menanamkan kesadaran ini kepada mahasiswa, agar mereka tidak hanya memahami masalah lingkungan secara teoretis, tetapi juga bertindak sebagai warga negara ekologis yang aktif. Kurikulum yang tidak relevan gagal membentuk kompetensi ini.

2. Konsep *Theological-Ecological Paradigm*

Paradigma ini mengintegrasikan ajaran teologis dengan prinsip-prinsip ekologi modern. Dukungan konseptual ini menegaskan bahwa ekoteologi harus melampaui pendekatan teologi konservatif dan merangkul pemahaman ilmiah tentang krisis lingkungan. Kurikulum yang usang atau tidak relevan menunjukkan kegagalan dalam mengadopsi paradigma ini secara holistik.

3. Konsep *Praxis*

Konsep *praxis* mengacu pada perpaduan antara teori dan praktik. Dalam pendidikan, *praxis* sangat penting agar mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Kurikulum yang tidak relevan gagal menjembatani kesenjangan antara teori ekoteologi dan praktik lapangan, sehingga lulusan tidak memiliki pengalaman praktis yang memadai.

4. Konsep *Stakeholder Theory*

Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan sebuah organisasi—dalam hal ini, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi—bergantung pada kemampuannya untuk mengelola hubungan dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Minimnya keterlibatan praktisi dan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum adalah kegagalan dalam menerapkan teori ini, yang mengakibatkan kurikulum tidak mencerminkan kebutuhan mereka.

5. **Konsep Inovasi Pendidikan (*Educational Innovation*)**
Konsep ini menjelaskan bahwa institusi pendidikan harus terus berinovasi untuk tetap relevan. Keterlambatan dalam pembaruan kurikulum adalah tanda bahwa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi belum melakukan inovasi yang diperlukan. Inovasi ini mencakup pembaruan materi ajar, metode pembelajaran, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
6. **Konsep *Relevansi Kurikulum (Curriculum Relevance)***
Konsep ini secara langsung menjadi inti masalah. Relevansi kurikulum adalah sejauh mana kurikulum memenuhi kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat serta dunia kerja. Ketika kurikulum program ekoteologi tidak mencerminkan isu-isu lingkungan lokal atau global, relevansinya dipertanyakan. Ini menciptakan kesenjangan antara apa yang dipelajari mahasiswa dan apa yang mereka butuhkan di dunia nyata.
7. **Konsep Sinergi Lintas Sektor**
Konsep ini menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai sektor (akademisi, pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk mencapai tujuan bersama. Program ekoteologi tidak akan berhasil jika berjalan sendiri. Lemahnya sinergi antara universitas dan pihak eksternal, seperti yang teridentifikasi dalam analisis, adalah hambatan konseptual yang serius. Sinergi ini penting untuk memastikan kurikulum tetap relevan dan memiliki dampak nyata.

METODOLOGI

Bagian ini menguraikan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel kebijakan ini. Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada Program Ekoteologi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk memahami secara mendalam fenomena kebijakan yang kompleks, seperti kesenjangan antara desain program prioritas dan implementasinya di tingkat universitas. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tantangan, mengidentifikasi akar masalah, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga mempertimbangkan konteks kelembagaan dan kebutuhan pemangku kepentingan yang spesifik.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi:

1. Data Primer

Data utama diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan kunci yang terlibat langsung atau terdampak oleh kebijakan program ekoteologi. Informan meliputi Pimpinan Universitas, Perwakilan dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Provinsi Jambi.

2. Data Sekunder

Literatur Ilmiah berupa Jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademis yang relevan dengan topik kajian, Dokumen Kebijakan dan Laporan Resmi, Peraturan perundang-undangan (UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pendidikan Tinggi), Peraturan Menteri Agama (PMA), Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, serta laporan

internal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi seperti Laporan Tinjauan Kurikulum (2024), Laporan SIMAK BMN, Profil Dosen, dan dokumen Rencana Kerja Anggaran.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, yang melibatkan proses sebagai berikut:

1. Wawancara: Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan informan yang telah ditentukan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan tantangan terkait implementasi kurikulum, sinergi antar lembaga, dan relevansi program dengan kebutuhan lokal.
2. Dokumentasi: Mengumpulkan, mengkaji, dan mengekstrak informasi dari berbagai sumber tertulis. Proses ini melibatkan pencarian sistematis pada database akademik dan situs web resmi, mengklasifikasikan dokumen berdasarkan relevansinya (misalnya, data kurikulum, data SDM, data anggaran), dan mengekstraksi fakta, konsep, dan argumen penting dari setiap sumber.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif secara bertahap, yang melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data: Memilah dan meringkas data yang relevan dari transkrip wawancara dan puluhan dokumen, dengan membuang informasi yang tidak diperlukan dan fokus pada data yang mendukung identifikasi masalah terkait relevansi kurikulum, sinergi pemangku kepentingan, dan sumber daya.
2. Penyajian Data: Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif serta tabel-tabel analisis. Secara khusus, data disajikan dalam bentuk Tabel *Analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG)* untuk menunjukkan prioritas masalah dan Tabel *Skoring Alternatif Kebijakan* untuk membandingkan efektivitas solusi yang diusulkan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Analisis Lanjutan: Melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan hubungan antarmasalah dan mengidentifikasi akar masalahnya. Analisis ini diperdalam dengan menggunakan dua kerangka kerja spesifik: Analisis USG untuk memprioritaskan masalah secara objektif dan Analisis Kriteria Kebijakan *William N. Dunn* untuk menilai dan memilih alternatif kebijakan yang paling komprehensif.
4. Verifikasi (Triangulasi Sumber): Membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan validitas temuan. Misalnya, temuan dari wawancara dengan perwakilan KLHK mengenai lemahnya sinergi diverifikasi dengan data dari laporan tinjauan kurikulum yang juga menyoroti minimnya keterlibatan pihak eksternal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis kebijakan terhadap program ekoteologi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara tujuan ideal dan implementasi di lapangan. Temuan utama dari analisis *Urgency, Seriousness, Growth (USG)* secara tegas menempatkan "Kurangnya Relevansi Kurikulum" sebagai masalah paling prioritas dengan skor total 14 dari 15. Masalah ini dianggap sangat mendesak karena berdampak

langsung pada kesiapan lulusan untuk menjawab tantangan ekologis spesifik di Jambi, seperti deforestasi dan kerusakan lahan gambut. Kurikulum yang cenderung umum dan teoretis gagal membekali mahasiswa dengan kompetensi praktis yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan komunitas lokal, sehingga program ini berisiko kehilangan kredibilitas dan relevansinya.

Secara teoretis, kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip fundamental dari Teori Relevansi Pendidikan Tinggi, yang menekankan adanya korelasi signifikan antara pendidikan dengan kebutuhan sosial dan lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, kurikulum yang ada tidak sejalan dengan esensi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang seharusnya berfokus pada penguasaan keterampilan aplikatif, bukan sekadar pengetahuan teoretis (Mulyasa, 2002). Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara "penawaran" kompetensi lulusan dari universitas dengan "permintaan" dari dunia kerja dan advokasi lingkungan, yang pada akhirnya melemahkan peran strategis UIN Jambi sebagai pusat keunggulan.

Analisis lebih dalam mengungkap bahwa akar masalah dari ketidakrelevanan kurikulum ini adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran internal mengenai urgensi pembaruan di kalangan pemangku kepentingan universitas. Keterbatasan pemahaman ini menciptakan inersia kelembagaan yang menghambat perubahan dan memicu berbagai persoalan turunan, seperti proses birokrasi yang kaku dan lambat, minimnya riset kebutuhan pasar, serta kurangnya inisiatif untuk merevisi kurikulum secara proaktif agar tetap adaptif terhadap perkembangan zaman.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Implementasi Kebijakan. Kebijakan program ekoteologi yang dirancang di tingkat pusat (*top-down*) oleh Kementerian Agama mengalami kegagalan implementasi di tingkat pelaksana (*bottom-up*). Menurut *Pressman & Wildavsky* (1973), keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan tujuan dan dukungan dari pelaksana di tingkat bawah. Dalam kasus ini, kurangnya pemahaman dan kemauan di level internal UIN Jambi menjadi penghambat utama, menciptakan jurang antara desain kebijakan dan eksekusi di lapangan. Hal ini juga mencerminkan minimnya inovasi kebijakan publik, di mana institusi gagal beradaptasi karena adanya resistensi terhadap perubahan (*Rogers*, 2003).

Masalah prioritas kedua, yaitu "Lemahnya Sinergi Antara Pemangku Kepentingan" (skor 13), merupakan konsekuensi logis dari akar masalah tersebut sekaligus menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Ekoteologi sebagai bidang interdisipliner pada hakikatnya menuntut kolaborasi erat antara akademisi dengan praktisi, pemerintah, dan komunitas. Tidak adanya platform kolaborasi yang formal dan terstruktur menyebabkan program ini terisolasi dari realitas dan isu-isu faktual di lapangan, menjadikannya sebuah "menara gading".

Keterisolasian ini merupakan wujud nyata dari kegagalan institusi dalam menerapkan Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*), yang menegaskan bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada kemampuannya mengelola hubungan dengan semua pihak yang relevan (*Freeman*, 1984). Dengan tidak melibatkan masukan dari KLHK, LSM lingkungan, atau industri secara sistematis dalam penyusunan kurikulum, program kehilangan kesempatan untuk memperkaya materi ajarnya dengan data dan studi kasus yang kontekstual, sehingga gagal menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

Menjawab kompleksitas masalah tersebut, analisis alternatif kebijakan menunjukkan bahwa usulan "Surat Edaran Rektor Tentang Revisi Kurikulum Berbasis Kemitraan" adalah solusi yang paling efektif dan komprehensif, dengan skor tertinggi 21 dari 25. Kebijakan ini dinilai unggul karena secara langsung menargetkan akar masalah dengan

"memaksa" adanya interaksi, kolaborasi, dan peningkatan kesadaran melalui keterlibatan aktif para pemangku kepentingan eksternal dalam sebuah tim perumus kurikulum yang formal.

Rekomendasi ini sejatinya bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan sebuah pergeseran paradigma dalam cara kurikulum dirancang. Ini adalah evolusi dari proses yang sebelumnya bersifat internal dan tertutup menuju sebuah model yang partisipatif, kolaboratif, dan terbuka. Tujuan utamanya adalah meruntuhkan sekat-sekat keilmuan dan tembok "menara gading" yang memisahkan universitas dari realitas sosial dan ekologis di sekitarnya.

Mekanisme dari kebijakan ini adalah pembentukan tim revisi yang bersifat multi-pihak, yang keanggotaannya tidak lagi didominasi oleh dosen internal. Tim ini secara spesifik akan melibatkan praktisi dari LSM lingkungan, perwakilan dari instansi pemerintah seperti KLHK, tokoh masyarakat adat, perwakilan sektor industri, serta alumni. Tugas mereka adalah melakukan riset kebutuhan bersama, memetakan tantangan ekologis terkini, dan merumuskan capaian pembelajaran yang benar-benar relevan dengan konteks Jambi.

Dalam jejaring kemitraan ini, peran strategis alumni tidak boleh dilupakan. Mereka yang memahami budaya internal kampus sekaligus realitas dunia profesional adalah jembatan paling efektif antara universitas dan para pemangku kepentingan eksternal. Keterlibatan alumni sebagai mentor, dosen tamu, atau fasilitator magang akan memberikan nilai tambah yang sangat signifikan bagi mahasiswa dan program.

Secara strategis, model kurikulum berbasis kemitraan ini merupakan pengejawantahan sempurna dari semangat kebijakan nasional Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini secara inheren menciptakan jalur-jalur yang terstruktur bagi mahasiswa untuk magang, terlibat dalam proyek kemanusiaan, atau melakukan riset bersama mitra di luar kampus, di mana semua kegiatan tersebut dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) mereka.

Selain itu, pendekatan ini juga merealisasikan konsep pendidikan transformatif dari *praxis*, yaitu perpaduan antara refleksi teoretis dan aksi nyata di lapangan (Freire, 1970). Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan meluas ke dalam praktik langsung yang berorientasi pada pemecahan masalah. Mahasiswa tidak hanya belajar tentang ekoteologi, tetapi melakukan ekoteologi.

Untuk mendukung implementasi kebijakan ini secara praktis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat memanfaatkan asetnya yang sangat berharga, yaitu kampus luas di Muaro Jambi seluas 68 hektar. Lahan ini dapat ditransformasikan menjadi sebuah "Laboratorium Alam Ekoteologi" sebagai ruang aktif untuk praktik konservasi keanekaragaman hayati, pertanian organik, pengelolaan sampah terpadu, atau proyek reforestasi skala kecil. Fasilitas ini akan menjadi etalase hidup penerapan prinsip-prinsip ekoteologi dan menjadi pusat pembelajaran berbasis pengalaman.

Penerapan kurikulum berbasis kemitraan ini akan memberikan manfaat transformatif bagi mahasiswa. Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoretis yang diperkaya studi kasus nyata, tetapi juga mengalami langsung bagaimana ilmunya diterapkan untuk memecahkan masalah. Kesenjangan antara ruang kelas dan dunia kerja terjembatani secara efektif, memberikan mereka pengalaman praktis dan jaringan profesional yang sangat berharga bahkan sebelum lulus.

Tantangan terbesar dalam transisi ini adalah mengatasi inersia institusional, sebuah kecenderungan untuk tetap berada di zona nyaman dan menolak perubahan yang didorong oleh birokrasi yang telah mengakar dan pola pikir konservatif. Mengelola perubahan budaya secara internal menjadi sama pentingnya dengan merancang aspek teknis kurikulum.

Oleh karena itu, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada peran kepemimpinan yang visioner dari pimpinan universitas. Rektor dan para dekan harus mampu menjadi motor penggerak utama, mengartikulasikan visi ini secara meyakinkan, memberikan dukungan politik, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memastikan inisiatif ini tidak berhenti sebagai wacana.

Untuk menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang, model kemitraan ini harus dilembagakan secara permanen ke dalam struktur universitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan para mitra, serta mengintegrasikan forum tinjauan kurikulum bersama ini ke dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) universitas. Dengan demikian, proses evaluasi dan adaptasi yang responsif menjadi bagian integral dari budaya peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

Penerapan model ini secara holistik akan menjadi perwujudan paling otentik dari mandat Tridharma Perguruan Tinggi. Aspek Pendidikan diperkuat melalui kurikulum yang relevan; aspek Penelitian didorong melalui riset bersama dengan mitra; dan aspek Pengabdian kepada Masyarakat terlaksana secara langsung saat mahasiswa dan dosen berkolaborasi dalam proyek-proyek nyata di komunitas.

Keberhasilan implementasi model ini di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berpotensi menciptakan efek gelombang (*ripple effect*) di tingkat nasional. Program ini dapat menjadi percontohan atau *blueprint* bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lainnya di Indonesia yang ingin mengembangkan program serupa. Inisiatif ini akan sejalan dengan strategi besar Kementerian Agama untuk menciptakan program studi yang spesifik, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta tantangan zaman.

Pada akhirnya, visi besar di balik semua upaya ini adalah untuk membentuk profil lulusan yang unik dan hibrida. Lulusan program ekoteologi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di masa depan tidak hanya akan menguasai dalil-dalil teologis tentang alam, tetapi juga akan cakap dalam analisis data ekologis, terampil dalam advokasi kebijakan, dan mahir dalam fasilitasi komunitas. Mereka adalah sosok intelektual-praktisi yang mampu berdialog dengan para ulama, berdebat dengan pembuat kebijakan, dan bekerja bahu-membahu dengan masyarakat untuk menjadi penjaga bumi yang berilmu, beriman, dan berdaya.

Analisis Kebijakan

1. Pembaruan Kurikulum Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA)

Kebijakan utama yang menjadi landasan adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi. Peraturan ini memberikan panduan mengenai standar isi, standar proses, dan standar kompetensi lulusan. Program studi pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat memperbarui kurikulumnya agar sejalan dengan standar ini, sambil tetap mengintegrasikan isu-isu lingkungan kontemporer.

2. Mekanisme Peninjauan Kurikulum Universitas

Setiap universitas memiliki mekanisme internal untuk meninjau dan menetapkan kurikulum. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki Pedoman Mekanisme Penetapan dan Pelaksanaan Kurikulum yang bisa dijadikan rujukan. Kebijakan ini dapat menjadi instrumen untuk mempercepat proses birokrasi yang kaku, asalkan ada inisiatif kuat dari internal program studi pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk merevisi kurikulum secara berkala.

3. Kebijakan Strategis Kementerian Agama

Kementerian Agama memiliki enam strategi untuk mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) berkualitas tinggi dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu strateginya adalah menciptakan program studi yang spesifik dan dibutuhkan pasar kerja. Kebijakan ini bisa menjadi dorongan bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk memastikan kurikulum ekoteologi pada program studi mereka unik dan relevan, sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) universitas

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang bertujuan untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Kebijakan ini dapat dimanfaatkan untuk secara rutin mengevaluasi relevansi kurikulum dan memastikan adanya perbaikan berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi keterlambatan yang signifikan.

5. Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Kebijakan ini didukung oleh berbagai regulasi, termasuk keputusan Dirjen Pendidikan Islam. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) mendorong mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi atau kampus, bahkan magang di industri. Kebijakan ini dapat menjadi solusi praktis untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan lapangan. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat mendesain kurikulum yang memungkinkan mahasiswa berinteraksi langsung dengan isu-isu ekologi di masyarakat dan industri melalui kegiatan di luar kampus.

Limitasi Kajian

Meskipun kajian ini memberikan analisis kebijakan yang mendalam, kajian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Fokus kajian yang bersifat studi kasus tunggal pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi membuat temuan dan rekomendasi yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lainnya, mengingat setiap institusi memiliki konteks sosial, budaya, dan tantangan yang unik. Selain itu, sumber data primer yang mayoritas berasal dari wawancara dengan pemangku kepentingan di level lembaga seperti Pimpinan Universitas, LPM, LPPM, dan KLHK kemungkinan belum sepenuhnya menangkap spektrum pandangan dari kelompok lain seperti mahasiswa, masyarakat adat, atau perwakilan industri secara lebih luas. Keterbatasan lainnya terletak pada sifat analisis kualitatif yang mengandung unsur subjektivitas peneliti dalam menginterpretasi data, meskipun telah diminimalkan dengan penggunaan kerangka analisis USG dan kriteria kebijakan yang terstruktur.

Kebaruan

Kebaruan artikel ini terletak pada analisis kebijakan yang mendalam dan spesifik, yang menjembatani kesenjangan antara kebijakan program ekoteologi tingkat nasional dengan kegagalan implementasinya di level institusi pendidikan tinggi Islam. Berbeda dari kajian umum yang mungkin berhenti pada masalah teknis, kajian ini berhasil mengidentifikasi akar masalah yang lebih fundamental, yaitu rendahnya kesadaran internal mengenai urgensi pembaruan kurikulum. Selain itu, kebaruan juga terletak pada perumusan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasis bukti, yaitu model "Surat Edaran Tentang Revisi Kurikulum Berbasis Kemitraan", yang dirancang secara sistematis melalui analisis USG dan kriteria kebijakan *William N. Dunn*. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan sebuah peta jalan (*roadmap*) yang aplikatif untuk merevitalisasi program studi agar relevan dengan tantangan ekologis lokal yang dihadapi.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Merujuk pada hasil analisis diatas, maka dapat diperoleh beberapa alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kemanfaatan kebijakan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sehingga hasil ini dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan masyarakat, industri dan pemerintah. Ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperoleh pilihan alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Rektor Tentang Revisi Kurikulum Berbasis Kemitraan
Menerbitkan Surat Edaran Rektor yang mengamanatkan revisi kurikulum program ekoteologi oleh program studi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Proses revisi ini harus melibatkan penyusun yang terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai disiplin ilmu, praktisi lingkungan, pemangku kepentingan dari sektor industri dan pemerintah daerah, serta alumni. Kebijakan ini akan memastikan kurikulum selalu mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta tantangan lingkungan yang ada.
2. Pembentukan Pusat Kajian Ekoteologi Interdisipliner
Menerbitkan kebijakan untuk membentuk pusat kajian yang menjadi wadah bagi dosen dari berbagai disiplin ilmu (seperti teologi, ekologi, sosiologi) untuk berkolaborasi. Pusat ini akan bertugas melakukan riset pasar secara rutin, mengadakan *focus group discussion*, serta merumuskan rekomendasi kurikulum yang terintegrasi dan relevan.
3. Kebijakan Insentif Dosen
Mengeluarkan kebijakan yang memberikan insentif, seperti penghargaan atau tunjangan khusus, bagi dosen yang berhasil mengembangkan mata kuliah atau metode pembelajaran interdisipliner. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong dosen agar memperdalam keahlian di luar bidang utamanya dan berkontribusi secara aktif dalam memperkaya kurikulum.
4. Integrasi Program Magang Wajib Berbasis Proyek
Menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap mahasiswa untuk mengikuti program magang berbasis proyek nyata ekoteologi di lembaga lingkungan, industri, atau komunitas. Kebijakan ini akan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta memastikan mahasiswa memiliki pengalaman langsung yang relevan dengan dunia kerja.
5. Pengalokasian Anggaran Khusus untuk Pengembangan Kurikulum
Menetapkan alokasi anggaran khusus dalam rencana kerja universitas untuk kegiatan pengembangan kurikulum. Dana ini dapat digunakan untuk mengadakan lokakarya, mengundang pakar dari luar, atau melakukan riset pasar secara profesional, sehingga hambatan finansial untuk pembaruan kurikulum dapat diatasi.

Untuk menentukan rekomendasi kebijakan, penulis menganalisis kelima alternatif kebijakan di atas menggunakan kriteria dari Teori Skoring Alternatif Kebijakan *William N. Dunn*, yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, dan Responsivitas. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagai berikut:

Tabel 2. Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total Skor
1	<p>Surat Edaran Rektor Tentang Revisi Kurikulum Berbasis Kemitraan</p> <p><i>Penjelasan:</i> Sangat efektif dalam meningkatkan relevansi karena melibatkan banyak pihak. Namun, efisiensinya rendah karena proses revisi yang kompleks dan memakan waktu. Cukup memadai untuk mengatasi masalah kurikulum secara menyeluruh. Pemerataannya baik karena semua pihak yang relevan dilibatkan. Responsivitasnya sangat tinggi terhadap isu-isu baru. (Sumber: Dunn, W. N. (2012). <i>Public Policy Analysis: An Integrated Approach</i>, dan Laporan Tinjauan Kurikulum LPM, 2024).</p>	5	3	4	4	5	21
2	<p>Pembentukan Pusat Kajian Ekoteologi</p> <p><i>Penjelasan:</i> Cukup efektif untuk jangka panjang karena pusat kajian akan secara rutin menghasilkan rekomendasi. Efisien karena riset pasar terpusat. Sangat memadai karena mengatasi akar masalah kurangnya riset. Pemerataannya terbatas pada internal UIN, meskipun dampaknya luas. Responsivitasnya tinggi, namun tidak secepat revisi kurikulum langsung. (Sumber: Dunn, W. N. (2012). <i>Public Policy Analysis: An Integrated Approach</i> dan Analisis</p>	4	4	5	3	4	20

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total Skor
	Kebutuhan Riset Internal, 2024).						
3	<p>Kebijakan Insentif Dosen</p> <p><i>Penjelasan:</i> Efektivitasnya moderat, karena tidak menjamin semua dosen akan merespon insentif dengan baik. Sangat efisien dari segi biaya dan waktu dibandingkan revisi total. Kecukupannya terbatas, hanya menyentuh aspek motivasi dosen, bukan struktur kurikulum. Pemerataannya terbatas pada dosen. Responsivitasnya cukup tinggi karena mendorong kreativitas dosen. (Sumber: Dunn, W. N. (2012). <i>Public Policy Analysis: An Integrated Approach</i> dan Data Realisasi Anggaran, 2024).</p>	3	5	3	3	4	18
4	<p>Integrasi Program Magang Wajib Berbasis Proyek</p> <p><i>Penjelasan:</i> Sangat efektif dalam memberikan pengalaman praktis, tetapi sangat tidak efisien dari segi biaya dan koordinasi dengan mitra eksternal. Cukup memadai karena langsung menjembatani teori dan praktik. Pemerataannya rendah karena tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama ke proyek berkualitas. Responsivitasnya sangat tinggi karena langsung berinteraksi dengan isu di lapangan. (Sumber: Dunn, W. N. (2012). <i>Public Policy Analysis: An Integrated Approach</i> dan Kepdirjen MBKM Kemenag, 2020).</p>	5	2	4	2	5	18
5	Pengalokasian Anggaran Khusus	2	5	2	1	3	13

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total Skor
	<p><i>Penjelasan:</i> Efektivitasnya rendah karena hanya menyediakan dana tanpa adanya kebijakan pelaksana. Sangat efisien jika dananya digunakan dengan tepat. Kecukupannya sangat rendah karena hanya merupakan prasyarat, bukan solusi itu sendiri. Pemerataannya sangat rendah karena hanya menguntungkan pihak yang memiliki akses ke dana. Responsivitasnya rendah karena tidak secara langsung mengatasi masalah inti. (Sumber: Dunn, W. N. (2012). <i>Public Policy Analysis: An Integrated Approach</i> dan Data Realisasi Anggaran, 2024).</p>						

Berdasarkan analisis scoring alternatif kebijakan menggunakan Teori *William N. Dunn*, alternatif "**Surat Edaran Tentang Revisi Kurikulum Berbasis Kemitraan**" menduduki peringkat pertama dengan total skor 21. Kebijakan ini dinilai paling komprehensif dan efektif dalam mengatasi akar masalah "kurangnya relevansi kurikulum" karena secara langsung melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dan merespons kebutuhan pasar kerja. Adapun alternatif "Pembentukan Pusat Kajian Ekoteologi" menempati peringkat kedua. Meskipun tidak secepat revisi kurikulum langsung, kebijakan ini menawarkan solusi yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kedua alternatif ini menjadi pilihan utama untuk diimplementasikan guna meningkatkan kualitas program ekoteologi pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Menyemai Relevansi Baru: Surat Edaran Tentang Revisi Kurikulum Berbasis Kemitraan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di tengah lanskap pendidikan tinggi yang terus bergerak dinamis, setiap institusi dituntut untuk senantiasa beradaptasi agar tidak kehilangan relevansinya. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagai salah satu pilar pendidikan Islam terkemuka di Sumatera, memahami betul tantangan ini. Upaya untuk terus berbenah bukanlah hal baru bagi universitas ini, yang senantiasa berusaha menyempurnakan perangkat pendidikannya demi menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berdampak.

Sebagai bukti komitmen tersebut, pada tahun 2021, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah mengambil langkah progresif dengan meluncurkan kurikulum yang dikenal sebagai "Kurikulum Transintegrasi Ilmu". Inisiatif ini merupakan sebuah upaya filosofis yang mendalam untuk meruntuhkan sekat-sekat keilmuan, mengawinkan nilai-nilai keagamaan dengan beragam disiplin ilmu pengetahuan modern. Tujuannya mulia, yakni

melahirkan intelektual yang memiliki pandangan holistik, mampu memahami kompleksitas dunia melalui berbagai lensa keilmuan yang saling terhubung.

Namun, perjalanan dari cetak biru filosofis menuju implementasi yang efektif di lapangan seringkali menemukan tantangan tak terduga. Meskipun fondasi transintegrasi ilmu telah diletakkan, program-program studi menghadapi kesenjangan yang nyata antara idealisme kurikulum dengan kebutuhan praktis di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa sebuah kerangka filosofis yang kuat perlu ditopang oleh mekanisme implementasi yang lebih membumi dan responsif.

Program ekoteologi, yang digagas Kementerian Agama, memiliki tujuan strategis untuk mencetak agen perubahan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Namun, di Jambi, sebuah provinsi yang dihadapkan pada krisis ekologis nyata seperti deforestasi, kerusakan lahan gambut, dan ekspansi industri ekstraktif, program ini justru terasa kurang kontekstual. Kurikulum yang diajarkan cenderung bersifat umum dan teoretis, seolah berjarak dari isu-isu genting yang terjadi di halaman belakang kampusnya sendiri.

Kondisi inilah yang melahirkan sebuah fenomena "menara gading", di mana program studi yang seharusnya menjadi ujung tombak solusi lingkungan justru terisolasi dari realitas di lapangan. Keterisolasian ini bukan hanya melemahkan dampak sosial program, tetapi juga secara langsung memengaruhi masa depan para lulusannya. Tanpa pemahaman mendalam mengenai konteks lokal, mereka kesulitan mengaplikasikan ilmunya secara efektif di dunia kerja.

Akibatnya, lulusan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menghadapi tantangan dalam hal relevansi keterampilan. Mereka tidak sepenuhnya siap untuk menjawab kebutuhan spesifik dari lembaga swadaya masyarakat, instansi pemerintah, maupun industri yang bergerak di sektor lingkungan di Jambi. Kesenjangan inilah yang menjadi justifikasi utama mengapa sebuah model revisi kurikulum baru yang lebih radikal dan terbuka sangat mendesak untuk diimplementasikan.

Menjawab tantangan tersebut, muncullah gagasan tentang kebijakan menerbitkan Surat Edaran Rektor Tentang Revisi Kurikulum Berbasis Kemitraan. Kebijakan ini merupakan sebuah evolusi dari revisi kurikulum yang bersifat internal dan tertutup, menuju sebuah proses yang partisipatif dan kolaboratif. Ini bukan sekadar tentang memperbarui daftar mata kuliah, melainkan tentang mengubah secara fundamental cara kurikulum itu dirancang, dikembangkan, dan dievaluasi.

Esensi dari pendekatan berbasis kemitraan adalah mengundang para pemangku kepentingan eksternal untuk duduk bersama di meja perancangan kurikulum. Proses yang sebelumnya didominasi oleh dosen dan akademisi internal kini dibuka selebar-lebarnya. Tujuannya adalah untuk menyerap pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan riil dari mereka yang setiap hari bergulat dengan isu-isu lingkungan secara langsung.

Para mitra strategis ini adalah aktor-aktor kunci dalam ekosistem lingkungan Jambi. Mereka mencakup praktisi dari lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi, perwakilan dari instansi pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memiliki data dan regulasi, tokoh masyarakat adat yang memegang kearifan lokal, serta perwakilan dari sektor industri yang dapat memberikan perspektif kebutuhan pasar.

Mekanisme implementasinya diwujudkan oleh program studi dengan melibatkan penyusun yang beranggotakan perwakilan dosen dari berbagai disiplin ilmu, praktisi lingkungan, pemangku kepentingan dari sektor industri dan pemerintah daerah, serta alumni, sebagaimana direkomendasikan dalam analisis kebijakan. Program studi Bersama mitra ini akan bertugas secara spesifik untuk melakukan evaluasi menyeluruh

terhadap kurikulum yang ada dan merumuskan kurikulum baru. Keanggotaannya yang beragam memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada spektrum pandangan yang luas, bukan lagi berdasarkan asumsi teoretis semata.

Proses kerja ini akan dimulai dengan melakukan riset dan analisis kebutuhan bersama. Mereka akan memetakan secara detail tantangan ekologis terkini di Jambi, mengidentifikasi kompetensi spesifik yang paling dibutuhkan oleh pasar kerja, dan merumuskan capaian pembelajaran yang benar-benar relevan. Dengan demikian, kurikulum yang dihasilkan akan bersifat dinamis, adaptif, dan kontekstual.

Hasilnya adalah sebuah kurikulum yang hidup. Materi ajar akan diperkaya dengan studi kasus nyata dari lapangan yang disumbangkan oleh para mitra. Metode pembelajaran akan bergeser menuju *project-based learning*, di mana mahasiswa ditugaskan untuk mengerjakan proyek-proyek nyata di komunitas atau lembaga mitra. Keterlibatan praktisi sebagai dosen tamu atau mentor juga akan menjadi sebuah praktik yang lazim.

Bagi mahasiswa, manfaat dari kurikulum semacam ini sangat transformatif. Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengalami langsung bagaimana teori itu diterapkan untuk memecahkan masalah nyata. Kesenjangan antara ruang kelas dan dunia kerja terjembatani secara efektif, memberikan mereka pengalaman praktis dan jaringan profesional yang sangat berharga bahkan sebelum mereka lulus.

Bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sendiri, penerapan model ini akan menjadi lompatan besar dalam meningkatkan reputasi dan kredibilitas institusi. Universitas akan bertransformasi dari sekadar lembaga pencetak sarjana menjadi pusat solusi dan inovasi bagi permasalahan regional. Peran strategisnya sebagai pusat keunggulan ekoteologi di Sumatera akan kembali menguat dan diakui secara luas.

Hubungan dengan para mitra pun akan berubah menjadi simbiosis mutualisme. Para praktisi mendapatkan akses terhadap kajian akademis untuk memperkuat kerja-kerja mereka di lapangan, sementara universitas mendapatkan "laboratorium sosial" yang tak ternilai harganya. Lebih dari itu, mitra industri dan pemerintah akan mendapatkan calon tenaga kerja yang kualifikasinya sesuai dengan ekspektasi mereka sejak hari pertama.

Model kurikulum berbasis kemitraan ini juga merupakan pengejawantahan sempurna dari semangat kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini secara inheren menciptakan jalur-jalur yang terstruktur bagi mahasiswa untuk magang, terlibat dalam proyek kemanusiaan, atau melakukan riset bersama mitra di luar kampus, yang semuanya dapat diakui sebagai bagian dari SKS mereka.

Potensi untuk menerapkan kurikulum berbasis praktik ini didukung penuh oleh aset fisik yang dimiliki universitas. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki dua lokasi kampus dengan karakteristik yang berbeda: Kampus 1 yang lebih ringkas berlokasi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi seluas 5 hektar, dan Kampus 2 yang sangat luas berlokasi di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 68 hektar. Aset lahan yang masif ini merupakan sebuah kanvas kosong yang menawarkan peluang luar biasa.

Secara khusus, Kampus 2 yang lapang dapat ditransformasikan menjadi sebuah "Laboratorium Alam Ekoteologi". Ini bukan lagi sekadar lahan untuk pembangunan gedung di masa depan, melainkan sebuah ruang aktif untuk *praxis*—perpaduan antara teori dan praktik—yang menjadi inti dari pendidikan transformatif. Kampus ini dapat menjadi etalase hidup dari penerapan prinsip-prinsip ekoteologi.

Di dalam laboratorium alam ini, mahasiswa dapat secara langsung terlibat dalam proyek-proyek nyata. Mereka bisa mengelola zona konservasi keanekaragaman hayati lokal, merancang dan menjalankan sistem pengelolaan sampah terpadu,

mempraktikkan pertanian organik, atau bahkan memimpin proyek reforestasi skala kecil. Pengalaman langsung ini akan menanamkan pemahaman yang jauh lebih dalam daripada ratusan jam teori di kelas.

Dalam membangun jejaring kemitraan, peran strategis alumni tidak boleh dilupakan. Mereka yang pernah dididik di dalam almamater dan kini telah berkiprah di berbagai sektor—pemerintahan, LSM, maupun dunia usaha—adalah jembatan paling efektif antara universitas dan dunia profesional. Pengalaman ganda mereka, memahami budaya internal kampus sekaligus realitas eksternal, menjadikan mereka mentor, dosen tamu, dan fasilitator magang yang tak ternilai.

Salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi dalam transisi ini adalah mengatasi inersia institusional, sebuah kecenderungan untuk tetap berada di zona nyaman dan menolak perubahan. Birokrasi yang telah mengakar dan pola pikir yang cenderung konservatif seringkali menjadi penghalang tak terlihat yang lebih sulit dirobuhkan daripada tembok fisik. Oleh karena itu, keberhasilan revisi kurikulum berbasis kemitraan tidak hanya bergantung pada rancangan teknisnya, tetapi juga pada kemampuan universitas untuk mengelola perubahan budaya secara internal.

Dalam konteks ini, peran kepemimpinan yang visioner menjadi faktor penentu yang tidak bisa ditawar. Pimpinan universitas, mulai dari Rektor hingga Dekan, harus tampil sebagai motor penggerak utama. Mereka harus mampu mengartikulasikan visi ini secara jelas dan meyakinkan, memberikan dukungan politik, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai. Kepemimpinan inilah yang akan menjadi kompas, memastikan bahwa inisiatif ini tidak berhenti sebagai wacana, melainkan menjelma menjadi sebuah gerakan transformatif.

Untuk menjamin keberlanjutan, model kemitraan ini tidak boleh bersifat sementara. Langkah selanjutnya adalah melembagakan kolaborasi ini ke dalam struktur universitas secara permanen. Hal ini dapat diwujudkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) jangka panjang, serta mengintegrasikan forum tinjauan bersama ini ke dalam Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) universitas. Dengan demikian, proses evaluasi yang responsif menjadi bagian integral dari siklus peningkatan kualitas berkelanjutan.

Lebih jauh, inisiatif ini merupakan perwujudan paling otentik dari mandat Tridharma Perguruan Tinggi. Aspek Pendidikan diperkuat melalui kurikulum yang relevan; aspek Penelitian didorong melalui riset bersama; dan aspek Pengabdian kepada Masyarakat terlaksana secara langsung saat mahasiswa dan dosen berkolaborasi dalam proyek-proyek nyata di komunitas. Kurikulum berbasis kemitraan menyatukan ketiga dharma tersebut menjadi satu tarikan napas.

Keberhasilan implementasi model ini di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berpotensi menciptakan efek gelombang (*ripple effect*) di tingkat nasional. Program ini dapat menjadi percontohan atau blueprint bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lainnya di Indonesia yang ingin mengembangkan program serupa. Ini akan sejalan dengan strategi Kementerian Agama untuk menciptakan program studi yang spesifik, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta tantangan zaman.

Pada akhirnya, visi besar di balik semua upaya ini adalah untuk membentuk profil lulusan yang unik dan *hibrida*. Lulusan program ekoteologi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di masa depan tidak hanya akan menguasai dalil-dalil teologis tentang alam, tetapi juga akan cakap dalam analisis data ekologis, terampil dalam advokasi kebijakan, dan mahir dalam fasilitasi komunitas.

Mereka adalah sosok intelektual-praktisi yang mampu berdialog dengan para ulama, berdebat dengan para pembuat kebijakan, dan bekerja bahu-membahu dengan

masyarakat di tingkat tapak. Mereka akan membawa solusi yang berakar pada spiritualitas dan teruji secara ilmiah untuk kelestarian bumi Jambi.

Dengan demikian, menerbitkan surat edaran revisi kurikulum berbasis kemitraan bukanlah sekadar perbaikan administratif. Ia adalah sebuah deklarasi, sebuah penegasan kembali bahwa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak hanya mendidik mahasiswanya tentang dunia, tetapi juga secara aktif mempersiapkan mereka untuk mengubah dunia.

Langkah ini akan memastikan bahwa semangat "Transintegrasi Ilmu" tidak hanya hidup dalam teks dan wacana, tetapi juga berdenyut dalam setiap tindakan nyata mahasiswanya di lapangan. Ini adalah jalan untuk mengembalikan program ekoteologi ke tujuan sejatinya: melahirkan penjaga bumi yang berilmu, beriman, dan berdaya

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Analisis kebijakan ini menyimpulkan bahwa program prioritas ekoteologi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak efektif akibat kurikulum yang tidak relevan dengan isu-isu lingkungan spesifik di Jambi. Ketidaksesuaian ini menyebabkan lulusan tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan masyarakat lokal, sehingga tujuan program untuk mencetak agen perubahan lingkungan yang andal tidak tercapai secara optimal.

Akar masalah dari ketidakrelevanan tersebut bersifat multifaset, mencakup faktor internal dan eksternal. Secara internal, terdapat kurangnya pemahaman mengenai urgensi pembaruan kurikulum yang diperburuk oleh proses birokrasi yang kaku. Secara eksternal, lemahnya sinergi dengan para pemangku kepentingan seperti praktisi, pemerintah daerah, dan industri mengakibatkan program terisolasi dari realitas lapangan. Kendala ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian interdisipliner di bidang teologi dan ekologi.

Sebagai solusi, direkomendasikan kebijakan menerbitkan "Surat Edaran Revisi Kurikulum Berbasis Kemitraan" sebagai alternatif paling efektif. Kebijakan ini mengamanatkan revisi kurikulum oleh program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal secara aktif. Pelibatan praktisi dan ahli dari luar diharapkan dapat menghasilkan kurikulum yang mutakhir dan responsif, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara teori akademis dengan kebutuhan praktis di lapangan dan menyelaraskan kembali program ekoteologi dengan tujuan strategisnya.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan skoring alternatif kebijakan, maka direkomendasikan kepada Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai pimpinan puncak perguruan tinggi untuk menerbitkan Surat Edaran Rektor Tentang Revisi Kurikulum Berbasis Kemitraan. Surat edaran ini mengamanatkan kebijakan revisi kurikulum program ekoteologi oleh program studi dengan melibatkan penyusun yang beranggotakan perwakilan dosen dari berbagai disiplin ilmu, praktisi lingkungan, pemangku kepentingan dari sektor industri dan pemerintah daerah, serta alumni. Program studi bersama mitra akan bertugas untuk melakukan evaluasi kurikulum secara menyeluruh dan merumuskan kurikulum baru yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan isu lingkungan kontemporer. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan program studi pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara teologis,

tetapi juga memiliki kompetensi praktis untuk berkontribusi secara nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.

REFERENSI

- Data Realisasi Anggaran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (2024).
- Data Rencana Kerja Anggaran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (2025).
- Database Mitra dan Jaringan Kerjasama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (2025).
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the Environment*. Oxford University Press. Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/0199258449.001.0001>
- Dokumen SPMI. (2024). Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Dunn, W. N. 2012. (1385). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (Vol. 17). Pearson Education.
- Freeman, R. edward. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/b.9780631218616.2006.00007.x>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
- Gray, B. (1989). *Collaborating: Finding Common Ground for an Interdependent World*. Jossey-Bass.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). (2020).
- Laporan Analisis Kebutuhan Riset Internal, LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (2024).
- Laporan Kementerian Agama RI tentang Enam Strategi Majukan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. (2023).
- Laporan Pengembangan SDM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (2024).
- Laporan SIMAK BMN UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (2024).
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman.
- McDaniel, J. B. (1983). *Of God and Pelicans: A Theology of Reverence for Life*. Wetminster/John Knox Press.
- Muhson, A., D. (2012). Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi dengan Dunia Kerja.
- Mulyasa, E. (2002). Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasinya. Remaja Rosdakarya.
- Outlook Kementerian Agama. (2024).
- Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal. (2022).
- Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi. (2020).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi. (2020).

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2015).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. (2019).
- Profil Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (2025).
- Rogers, E. M. (n.d.). *Diffusion of Innovations*, 5th ed. Free Press.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009).
- Wawancara dengan LPM, Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (. (2025).
- Wawancara dengan LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2025).
- Wawancara dengan perwakilan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jambi. (2024).
- Wawancara dengan Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (2025).
- Wiles, J. W. (2009). *Curriculum Essentials: A Problem-Solving Approach*. Pearson.